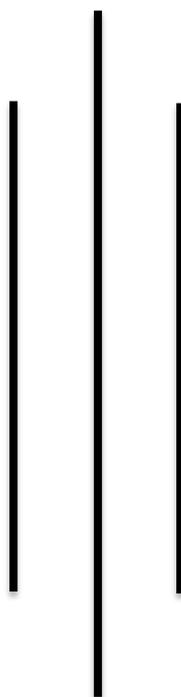




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 dapat di selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun 2024, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran Kantor Kesbangpol Kota Sibolga, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Sibolga dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Adapun **Tujuan** Kantor Kesbangpol Kota Sibolga harus mengacu pada Kota Sibolga Tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, dan sasaran nya adalah : **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”**.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sibolga yang salah satunya menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, stakeholder, swasta dan aparat pemerintah daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga maupun Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Sibolga sehingga berhasil dengan baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Kantor Kesbangpol Kota Sibolga ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Sibolga pada umumnya.

Sibolga Februari 2025
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SIBOLGA,**



Ahmad Yari Nasution
Pembina/IVA
NIP. 19680426 198903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kota Sibolga sebagaimana yang tertuang dalam Renstra dan terimplementasi dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbangpol Kota Sibolga, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP ini akan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Kantor Kesbangpol selaku pimpinan SKPD kepada Wali Kota Sibolga ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yaitu tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kantor Kesbangpol Kota Sibolga Tahun 2021–2026. Wilayah Kota Sibolga merupakan kota kecil yang mempunyai potensi yang luar biasa mengingat letak geografisnya dan kondisi demografisnya yang menyebabkan Kota Sibolga mempunyai peran yang cukup penting sebagai indikator kondusifitas wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Kota Sibolga terletak ditengah Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena letaknya yang strategis berada di pantai barat Sumatera Utara dan menjadi jalur antar daerah, menjadikan kota ini sebagai Pusat perdagangan barang dan jasa maupun pariwisata. Kota Sibolga menjadi penghubung antara Pulau Sumatra dengan Pulau Nias. Kota Sibolga dijuluki sebagai Kota Ikan dan Negeri Berbilang Kaum. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga terletak di Jl. S. Parman No. 54 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Sumatera Utara. Salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Sibolga yang hanya memiliki luas 10,77 km².

Arah kebijakan umum pembangunan Kota Sibolga tahun 2021-2026 salah satunya adalah ” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**”

Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah serta penguatan peraturan daerah dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat serta peningkatan swadaya masyarakat untuk mengantisipasi perubahan sosial, politik serta meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan kondisi politik di wilayah. Salah satu tugas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai instrumen desentralisasi dan dekonsentrasi adalah penyelenggaraan fungsi kesatuan bangsa dan politik di daerah salah satunya adalah penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta pengawasan/monitoring evaluasi ormas.

Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:.

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”
mewujudkan sasaran yang ingin dicapai untuk masyarakat Kota Sibolga antara lain:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”

Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan Pemerintah Kota Sibolga, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha mengidentifikasi beberapa hal - hal penting sebagai permasalahan pokok dalam urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri skala regional (perspektif wilayah Kota Sibolga) adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Kota Sibolga dengan kemajemukan suku, etnis, agama dan budaya.
2. Makin bertambahnya penduduk yang datang maupun pendatang sehingga akan berdampak pada rumitnya pemantauan terhadap potensi konflik yang mana akan mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban.
3. Apatisme terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional pada sebagian masyarakat khususnya generasi muda.
4. Agenda lima tahunan (pilkada) yang berimplikasi pada meningkatnya suhu politik yang pada gilirannya menyebabkan kerawanan sosial.
5. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras.
6. Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok dan BBM, sehingga akan menyebabkan pada makin menurunnya tingkat rasa aman di masyarakat akibat kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan naiknya angka kriminalitas.
7. Memperkokoh/memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan semangat kebangsaan dalam menghadapi berbagai tuntutan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 tahun 2008 dan perubahan kedua Perda nomor 11 tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga sampai saat ini masih tetap menjalankan tugas seperti biasanya menunggu Perda yang baru. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggungjawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah.

Secara Umum Program Kerja dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Kota Sibolga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga teknis Daerah Kota Sibolga dan Permendagri Nomor : 12 tahun 2006, membantu Wali Kota Sibolga dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota Sibolga di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga adalah **“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifikasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik“**, adapun penjabaran Tugas Pokok Fungsi tersebut adalah :

- 1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga Politik dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar organisasi sosial kemasyarakatan, profesi dan kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan di daerah;

- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. Pelaksanaan kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana lain.
- Penjabaran:
- a. Menyiapkan dan menyusun bahan dan program kerja serta evaluasi;
 - b. Mengadakan, mengelola dan memelihara peralatan dan kelengkapannya;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan, program dan kegiatan kantor.
- 3) Kepala Seksi Pengembangan Nilai- Nilai Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan.
- Penjabaran:
- a. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembaharuan bangsa dan masyarakat;
 - b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa;
 - c. Melaksanakan pembinaan ideologi, pembinaan kesatuan bangsa dan penanggulangan masalah strategis lainnya;
 - d. Menyiapkan program dan kebijakan pemberdayaan kelembagaan bidang kesatuan bangsa;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
- 4) Kepala Seksi Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka membina stabilitas sosial politik.
- Penjabaran:
- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kerjasama dengan Parpol dalam rangka membina stabilitas politik;

- b. Menghimpun dan mengelolah data dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan demokratisasi dan pengkajian masalah strategis lainnya;
 - c. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan dan/atau antar lembaga politik dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan di daerah dan pemeliharaan hasil-hasilnya;
 - d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan data serta menyusun rencana yang diperlukan dalam bidang pengamanan politik.
- 5) Kepala Seksi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pelaksanaan program organisasikemasyarakatan.
- Penjabaran :
- a) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kerjasama dengan Ormas dalam rangka membina stabilitas kesatuan bangsa;
 - b) Menghimpun dan mengelolah data dalam rangka penyusunan rencana program dan pelaksanaan pembinaan Ormas dan masalah strategis lainnya;
 - c) Merumuskan kebijakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan dan/atau antar Ormas dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan di daerah dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Perlu kami tambahkan bahwa pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Sibolga terdapat beberapa Organisasi yang sekretariatnya melekat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga yang juga punya tupoksi sendiri yaitu :

- 1) Kantor Narkotika Kota (BNK) Sibolga sesuai SK Wali Kota Nomor : 354/178/2012, tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010.

Tugas : Membantu Wali Kota untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, pemberantasan dan penindakan terhadap

pemakaian, pengedaran dan perdagangan Narkotika Psikotropika dan obat – obat terlarang lainnya.

2) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Sibolga sesuai SK Wali Kota Nomor : 300/145/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 300/33/2016, tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Sibolga.

- Tugas:
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Kota Sibolga;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peningkatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kota Sibolga;
 - c. Menyampaikan hasil rapat/ pertemuan kepada Wali Kota Sibolga secara berkala setiap 6 bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu.

3) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sibolga sesuai SK Wali Kota Nomor : 450/180/Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013.

Tugas:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;m
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota Sibolga dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Fungsi:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota Sibolga;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendiri rumah ibadah.
- 4) Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Sibolga SK Wali Kota Nomor : 220/94/ Tahun 2015, tanggal 06 Maret 2015.
Tugas: a. Membantu Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan Tentangpotensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana; .
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKDM dengan Pemerintah Kota Sibolga dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, peristiwa bencana serta penanggulangannya;
 - c. Menyampaikan laporan hasil rapat pertemuan kepada Wali Kota Sibolga secara berkala per semester bulan Juni dan Desember Tahun berjalan.
- 5) Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Sibolga SK Wali Kota Nomor : 200/78/ Tahun 2015, Tanggal 27 Pebruari 2015.
Tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan ancaman keutuhan dan kerukunan bangsa di daerah;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Kota Sibolga dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah dalam pemeliharaan keutuhan dan kerukunan bangsa di daerah;

- c. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari ber bagai Ras, suku dan etnis;
- d. Menggali dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal;
- e. Mengkoordinasikan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pembauran Kebangsaan;
- f. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Pertikal di Kota Sibolga dalam Pembauran Kebangsaan;
- g. Memberikan Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Deteksi Dini, Peringatan Dini terhadap Ancaman Stabilitas Nasional di daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Organisasi Masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga Politik dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar organisasi kemasyarakatan, profesi dan kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengembangan Nilai Kebangsaan (PNK)

d. Seksi Politik

e. Seksi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

f. Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat BNK (Kantor Narkotika Kota) Sibolga ;
2. Sekretariat KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) Kota Sibolga;
3. Sekretariat Dewan Penasehat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Sibolga;
4. Sekretariat Dewan Penasehat FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kota Sibolga.
5. Sekretariat Dewan Penasehat FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

BAGAN 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari :

a. PNS : 13 Orang

b. THL : 14 Orang

Jumlah Pegawai : 27 Orang

Tabel 1. 1
Daftar Nama-Nama Pegawai
Kantor Kesatuan dan Politik Kota Sibolga

No.	NAMA/NIP	JABATAN	ESELO N	GOL.	PENDIDIK AN	KE T.
		3	4	5	6	7
1.	Ahmad Yani Nasution NIP. 19860426 198903 1 005	Kepala Kantor	IIIa	IV/a	SMA	
2.	Nispa Dewi Pasaribu, SH Nip. 19870312 201101 2 020	Kassubag Tata Usaha	IV	III/d	S1	
3.	Udeno Alexander panggabean S.AP NIP.19720531 200321 2 005	Kasi ORMAS	IV	III/d	S1	
4.	Febrianti Agustina Sitorus, S.IP Nip. 19740220 200312 2 005	Kasi Ormas	IV	III/c	S1	
5.	Irena Tripenia Pakpahan Nip. 19910330 201507 2 001	Kasi Politik	IV	III/b	S1	
6.	Togi Marito Sitompul Nip.19740414 199402 1 005	STAF	-	III/d	SMA	
7.	Syafruddin Atmaja,ST Nip. 19810224 200312 1 004	STAF	-	III/c	S1	
8.	Lelly Henni Frida Sihotang Nip.19770425 200701 2 004	STAF	-	III/c	S1	
9.	Nelli Suheini Pasaribu, S.IP Nip. 19780502 200604 2 001	STAF	-	III/a	S1	
10.	Dina Adat Mariana Sinaga Nip. 19820828 200604 2 024	STAF	-	III/a	SMA	
11.	Desi Angraini, S.Pd Nip. 19961218 202421 2 007	STAF	-	IX	S1	
12.	Helen Mutiara Sitompul Nip. 19831118 200701 2 001	STAF	-	III/d	S1	
13.	Januari Panggabean Nip. 19730105 200701 1 004	STAF	-	II/d	SMA	
14.	Rani Widyana Ullly	Honoror	-	-	S1	
15.	Vernandes Aritonang	Honoror	-	-	STM	
16.	Doly Namarsahala. S	Honoror	-	-	S1	
17.	Wilda Wijaya Batubara	Honoror	-	-	S1	
18.	Ridho Kasih Lestari Hutasoit	Honoror	-	-	D-III	
19.	Adri Anba Simbara Sinaga	Honoror	-	-	S1	
20.	Cindy Cisilya Angelia Situmeang	Honoror	-	-	S1	
21.	Lundu Aprianto Tinambunan	Honoror	-	-	S1	
22.	Natalian Dori Panjaitan	Honoror	-	-	SMK	
23.	Petrus Perdana Uli Siahaan	Honoror	-	-	D-II	
24.	Betty Sonya Sembiring	Honoror	-	-	D-III	
25.	Julias Batubara	Honoror	-	-	SMK	
26.	Siebzehn Agustus Aritonang	Penjaga malam	-	-	SMA	
27.	Doni Khairulsyah Lubis	Petugas Kebersihan	-	-	SD	

Berikut ini data ASN dan THL Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga yang diklasifikasikan berdasarkan golongan sebagaimana **Tabel 1. 2** dan tingkat pendidikan sebagaimana **Tabel 1. 3** berikut :

Tabel 1. 2
ASN Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
Berdasarkan golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	-	-	-
2.	II	1 Orang	1 Orang	2 Orang
3.	III	2 Orang	6 Orang	8 Orang
4.	IV	2 Orang	-	2 Orang
5.	IX	-	1 Orang	1 Orang
JUMLAH		5 Orang	8 Orang	13 Orang

Tabel 1. 3
PNS pada Kantor Kesatuan dan Politik Kota Sibolga
Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA	1 Orang	3 Orang	4 Orang
4.	D-1	-	-	-
5.	D-III	-	1 Orang	1 Orang
7.	S-1	3 Orang	4 Orang	7 Orang
8.	S-2	1 Orang	-	1 Orang
JUMLAH		5 Orang	8 Orang	13 Orang

Rekapitulasi Menurut Pangkat/ Golongan

- a. Pembina TK I : -
- b. Pembina : 2 Orang
- c. Penata TK. I : 2 Orang
- d. Penata : 4 Orang
- e. Penata Muda TK. I : -
- f. Penata Muda : 3 Orang
- g. Pengatur TK. I : 1 Orang
- h. Pengatur Muda TK. I : 1 Orang
- i. Pengatur : -
- j. Pengatur Muda : -
- Jumlah : 13 Orang**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

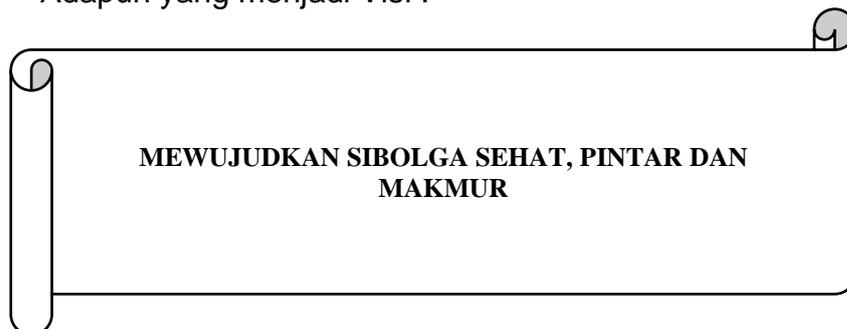
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. VISI DAN MISI

Visi merupakan pernyataan cita – cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita – citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha – usaha pembangunan yang dilaksanakan umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga tahun 2021 – 2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembanguna daerah.

Adapun yang menjadi Visi :



Adapun yang menjadi Misi :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat Infrastruktur kota yang terang dengan manfaat tata ruang yang berwawasan kota pintar (*smart City*);
4. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh harapan kebutuhan belajar 9 Tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru;
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

b. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kantor Kesbangpol Kota Sibolga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kesbangpol juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik di level Bidang maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

c. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Kantor Kesbangpol Kota Sibolga Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun yang berisi tentang Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan adalah upaya langkah yang spesifik dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun beberapa Tujuan dari Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik seperti dibawah ini :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

b. Sasaran

Dari Tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dengan sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”

2. KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Sibolga yang sejalan dengan Misi Pertama yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel. Sehingga Sasaran, Kebijakan dan Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai berikut :

a. Kebijakan :

- 1) Menyelenggarakan fasilitasi organisasi masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta pengawasan/ monitoring evaluasi Ormas.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi Tim FKDM, kewaspadaan Dini, Monev dan Pengawasan Orang/Lembaga Asing

Maksud kebijakan **kedua** adalah melaksanakan pengawasan serta monitoring ormas yang berada di Sibolga, memberikan fasilitasi Ormas serta hibah Ormas, mengajak ormas untuk berperan serta dalam pembangunan Kota Sibolga.

Maksud kebijakan **kedua** memelihara kewaspadaan atas setiap gejala-gejala yang mengarah kepada tindakan pemecah belah komponen bangsa (dis-integrasi bangsa) baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri serta mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Dari sasaran kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kebijakan di Bidang Administrasi Umum Pemerintahan yaitu sub bidang Politik, Hukum, Keamanan dan ketertiban Masyarakat, yang dijabarkan ke dalam Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun program-program mengalami perubahan nomenklatur yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada Kantor Kesbangpol seperti dibawah ini:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(4) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporani di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter

bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan

c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik.

- Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

(1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,

sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

- Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

(1) Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.

3. RENCANA KINERJA SASARAN DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dituangkan kedepan Rencana Kerja SKPD, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Sibolga dalam satu tahun berjalan.

Pada tahun 2024, dalam Program Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan sasaran, indikator dan rencana tingkat capaian target. Sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 berikut ini, akan memberikan gambaran dan deskripsi yang jelas bagaimana indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun berjalan akan terlihat/terbaca pada rencana tingkat capaian (target) Korelasi ini akan dikomparasi dan di lihat realisasinya setelah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.1

Rencana Kerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Penyelenggaraan Kelancaran dalam Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang WawasanKebangsaaan,	Meningkatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan Paskibraka Kota	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

	Ideologi dan Pembaruan Bangsa serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Meningkatnya kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa	Penyelenggara an fasilitasi Partai Politik, hibah Partai Politik serta pengawasan/ monitoring evaluasi Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik
		Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi Organisasi Masyarakat,hibah organisasi	Penyelenggara an fasilitasi organisasi Masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta pengawasan/ monitoring evaluasi ormas	Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi kemasyaraka tan
		Mengintensifkan penggunaan sosial media		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya
		Mengintensifkan penggunaan sosial media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba	Penyelenggara an Sosialisasi Pencegahan Penyalahguna an Narkotika	Program Peningkatan Kewaspadaa n nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi dan penanganan konflik sosial
		Meningkatkan fungsi TIM FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga Asing	Penyelenggara an koordinasi Tim FKDM,kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga Asing	

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun						Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	NA	70	72	74	76	78	80	80
2	Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	%	NA	72	74	76	78	80	82	82
3	Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	%	NA	74	76	78	80	82	84	84

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Sibolga guna mewujudkan target kinerja, sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan Kinerja Aparatur	Terciptanya Aparatur yang Kompeten dan Terampil	Persen	100
2.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	100
		Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	100
3.	Mewujudkan Lingkungan yang aman dan tertib	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring	Persen	100
4.	Mewujudkan Masyarakat dan Parpol yang paham politik	Jumlah Parpol, Ormas, LSM, OKP dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Persen	100

Jumlah Anggaran :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.327.831.809
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	578.767.919
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	24.171.677.837
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	4.586.852.032
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	
		<hr/>	Rp. 31.665.129.597

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- e. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan; dan

- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

Tabel 2.4.

Program/Kegiatan dan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	2	3		4	5
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA				28.770.471.381
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Kelancaran dalam Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah			1.860.016.169
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.307.271.405
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN dipenuhi			1.307.271.405
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum			199.307.155
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan Logistik berupa makanan dan minuman kegiatan serta Jaga malam pegawai			3.341.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.086.100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga			3.343.300
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor			40.619.455
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			6.707.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			125.209.300
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, pemanfaatan sumber daya air dan listrik			
	pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			254.132.183
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu Penyediaan jasa surat menyurat			2.340.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, pemanfaatan sumber daya air dan listrik			34.992.183
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL/Honorar) yang terpenuhi			216.800.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipenuhi			99.305.426
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			57.129.541,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu pemeliharaan mebeleur			3.200.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.380.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			29.595.885,00
	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				577.981.786
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				577.981.786
	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Terlaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan			

	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Terlaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan			396.036.302,00
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporani di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Terlaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporani di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan			181.945.484,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				23.037.337.426
8	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik				23.037.337.426
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Tersusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			319.368.486
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Terlaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Terlaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			22.717.968.940
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				3.295.136.000

9	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				3.295.136.000
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah	tersusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			3.295.136.000
	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah	Terlaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah	Terlaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				0
10	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				0
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Terlaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Terlaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				0
11	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				0

	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Terlaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Terlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Terlaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
JUMLAH					28.770.471.381

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari SKPD, Kantor hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kantor Kesbangpol Kota Sibolga selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesbangpol Kota Sibolga tahun 2024.

Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Nilai dan Kategori
Predikat Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

NILAI	KATEGORI/PREDIKAT
>91 – 100	AA / Sangat Memuaskan
>80 – 90	A / Memuaskan
>70 – 80	BB / Sangat Baik
>60 – 70	B / Baik
>50 – 60	CC / Cukup (Memadai)
>30 – 50	C / Kurang
>0 – 30	D / Sangat Kurang

Sumber : PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2024

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui, sebagaimana tertera pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0 %
A	
BB	10 %
B	15 %
CC	20 %
C	30 %
D	

Sumber : PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2024

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah 1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (langkah 2).

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah 3) pada setiap indikator kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan hasil perhitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu : 1. Sangat kurang; 2. Kurang; 3. Butuh Perbaikan; 4. Baik; dan 5. Istimewa dengan rincian sesuai Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100 \%$	Istimewa
$80 \% < X \leq 100 \%$	Baik
$60 \% < X \leq 80 \%$	Butuh Perbaikan
$20 \% < X \leq 60 \%$	Kurang
$0 \% \leq X \leq 20 \%$	Sangat Kurang

Sumber : PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2024

Tabel 3.4. Interpretasi Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI	INTERPRESTASI
Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan diatas ekspektasi. praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
Butuh Perbaikan	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi.
Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.

Dalam melaksanakan penilaian kinerja organisasi, setiap Instansi Pemerintah perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan untuk memastikan hasil penilaian *reliable* dan dapat diandalkan. adapun prinsip yang dimaksud antara lain :

1. Berorientasi hasil, menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi;
2. Berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun;
3. Objektif, pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian;
4. Adil, penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas;
5. Transparan, penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber daya yang jelas serta dilakukan secara terbuka;
6. Akuntabel, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
7. Periodik, penilaian kinerja dilakukan secara kerkesinambungan dalam kurun waktu yang tetap.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga beserta target dan capaian realisasinya dirinci.

1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Hasil pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76	93	100%
2.		Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	78	100	100%
3.		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	80	100	100%

Dari tabel 3.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kantor Kesbangpol Kota Sibolga diatas dapat di lihat bahwa :

(1) Indikator Kinerja Daerah yaitu Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah	Data Awal 2020	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		76	93	100%

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan} \\
 &= \frac{\text{Jumlah masyarakat/peserta yang diberikan pemahaman}}{\text{Jumlah masyarakat/peserta yang menjadi target diberikan pemahaman}} \times 100 \\
 &= \frac{123}{132} \times 100 \\
 &= 93\%
 \end{aligned}$$

- ✓ Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini: Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 76 % terealisasi 93% , yang artinya Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di wilayah Sibolga meningkat.
- ✓ Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Realisasi capaian kinerja tahun ini adalah 93% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 belum ada data, sehingga tidak dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya.
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
 - Koordinasi yang intens antara pemerintah Kota Sibolga dengan Ormas.
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Untuk Indikator Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sudah efisien dikarenakan Target dapat tercapai 93%, adapun Program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan anggaran Rp. **578.767.919** dan terealisasi sebesar **95,31 %** atau Rp. **577.981.786**.

(2) Indikator Kinerja Daerah yaitu Presentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah	Data Awal 2020	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Presentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi		78	100	100%

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Potensi Konflik}}{\sum \text{Jumlah potensi konflik terselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100$$

$$= 100\%$$

- ✓ Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini: Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 100 % terealisasi 100% , yang artinya konflik di wilayah Kota Sibolga dapat terselesaikan sehingga kondisi Kota Kota Sibolga kondusif.
- ✓ Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Realisasi capaian kinerja tahun ini adalah 100% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 belum ada data, sehingga tidak dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya.
- ✓ Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target Kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi Realisasi Kinerja pada Tahun ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPJMD, dengan prosentase tingkat capaian 100 %.
- ✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
 - Koordinasi yang intens antara pemerintah Kota Kota Sibolga dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Kota Sibolga serta pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta Tim Penanganan Konflik Sosial
 - Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan Nasional
 - Diselenggarakannya rasa patriotisme dengan peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat serta pendidikan karakter.

(3) Indikator Kinerja Daerah yaitu Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik yang Terjadi capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah	Data Awal 2020	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik		80	100	100%

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Pendidikan Politik yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Target Pendidikan Politik yang Dilaksanakan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100$$

$$= 100\%$$

- ✓ Perbandingan Target pada Tahun ini adalah 100 % sedangkan realisasi adalah 100 %
- ✓ Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi. Realisasi Prosentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai 100 %.
- ✓ Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
- ✓ Analisis penyebab Keberhasilan peningkatan kinerja
 - Diselenggarakannya Pendidikan Politik bagi Masyarakat secara berkala
 - Harmonisasi antara Pemerintah dengan Partai Politik serta Masyarakat
 - Paham Berideologi dan Wawasan Kebangsaan yang cukup tinggi di Masyarakat yang berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilu.
 - Masyarakat yan sekarang lebih melek dengan ilmu politik
- ✓ Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan

Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp.24.171.677.837 dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.037.3373426.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja sepanjang periode Renstra

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dari periode awal Renstra hingga Tahun 2024 adalah sebagai Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan,	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			76	93	100
2	Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi			78	100	100
3		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik			80	100	100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Realisasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 dengan target Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan,	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		80	93	Akan Tercapai
2.	Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi		82	100	Akan Tercapai
3.		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik		84	100	Akan Tercapai

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2024

Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2024 serta Solusi yang dilakukan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan,	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76	93	100	Terlaksananya Sosialisasi terkait Wawasan Kebangsaan	
2.	Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi	Presentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	78	100	100	Terselesaikannya konflik sosial yang terjadi di masyarakat	
3.	Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	80	100	100	Terdapat kesadaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak suaranya	

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2024 didasarkan pada Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02.2017. Hasil perhitungan efisiensi seperti pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76	93	100	578.767.919	577.981.786	99,86	0,14
2.		Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	78	100	100				
3.		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	80	100	100	24.171.677.837	23.037.337.426	95,31	4,69

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang mana menjadi sasaran strategis didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.665.129.597 (Tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 75 % dari total anggaran DPPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024. Realisasi anggaran dari 4 (Empat) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang menunjang tersebut sebesar Rp. 28.770.471.381 (Dua puluh delapan milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 90,86 %.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Penguatan Dan Pemantapan Dalam Pengamalan Nilai - Nilai Ideologi Pancasila	99,86	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	99,86	
2.		Presentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	100				
3.		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Parpol	95,31	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan Di Bidang Politik	95,31	

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan dalam DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga sebesar Rp. 23.871.163.277 dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DPPA menjadi 31.665.129.597 sedangkan realisasi anggaran s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp. 28.770.471.381 atau dengan serapan anggaran mencapai 90,86 %, dengan sisa anggaran Rp. 2.894.658.216 atau 9,14 %.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran selama periode Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11. Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2022 s.d 2024

NO.	TAHUN	PAGU ANGGARAN					
		Sebelum Perubahan Rp.	Setelah Perubahan Rp.	Bertambah / Berkurang		Realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%
1.	2022	10.902.115.729	10.439.641.141	-462.474.588	-4,43	9.424.319.610	95,76
2.	2023	7.053.269.956	11.725.898.898	4.672.628.942	39,85	8.480.927.916	72,33
3.	2024	23.871.163.277	31.665.129.597	7.793.966.320	406	28.770.471.381	90,86

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

Dari pagu anggaran yang diterima Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang menyebar di 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) sekretariat yang ada. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
		(Rp)		
1	2	4	5	9
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA	31.665.129.597	28.770.471.381	90,86
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.327.831.809	1.860.016.169	79,90
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.305.678	1.307.271.405	74,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.759.305.678	1.307.271.405	74,31
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.647.081	199.307.155	99,83
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.348.800	3.341.700	99,79
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.099.700	20.086.100	99,93
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.347.800	3.343.300	99,87
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	40.627.281	40.619.455	99,98
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.707.500	6.707.300	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.516.000	125.209.300	99,76
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			
	pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.290.115	254.132.183	96,16
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.340.000	2.340.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.150.115	34.992.183	77,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.800.000	216.800.000	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.588.935	99.305.426	94,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.683.050,00	57.129.541,00	92,62
	Pemeliharaan Mebel	3.200.000,00	3.200.000,00	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000,00	9.380.000,00	92,78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	29.595.885,00	29.595.885,00	100
	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	578.767.919	577.981.786	99,86
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	578.767.919	577.981.786	99,86
	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	396.822.435,00	396.036.302,00	99,80
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporani di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	181.945.484,00	181.945.484,00	100
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	24.171.677.837	23.037.337.426	95,31
8	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	24.171.677.837	23.037.337.426	95,31

	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	353.708.897	319.368.486	90,29
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	23.817.968.940	22.717.968.940	95,38
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.586.852.032	3.295.136.000	71,84
9	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	4.586.852.032	3.295.136.000	71,84
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah	4.586.852.032	3.295.136.000	71,84
	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	0	
10	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0	0	

	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	0	0	
11	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0	0	
	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah			
JUMLAH		31.665.129.597	28.770.471.381	90,86

Realisasi anggaran pada Triwulan IV (empat) mencapai 90,86 % atau sebesar 28.770471.381,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh seribu tuga ratus delapan puluh satu rupiah).

Dari 6 (Enam) Program terdapat 2 (dua) Program yang realisasi anggarannya dibawah 80 %, yaitu Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, 2 (Dua) Program yang tidak ada anggarannya, yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

C. MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) TAHUN 2023

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Inspektur Daerah Kota Sibolga pada tanggal 29 Februari 2024 Nomor 710.4/07/II/LHP.LKJiP/ 2024 dimana Laporan Hasil Evaluasi ini diterima pada bulan Maret 2024, terdapat beberapa rekomendasi terkait evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023. Terhadap rekomendasi tersebut upaya yang telah dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga, yaitu :

Tabel 3.13. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tahun 2023

No.	Rekomendasi Inspektorat	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja Agar Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga mempunyai Dokumen Perencanaan Kinerja Tepat Waktu	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor kesbangpol 2024 telah dipublikasikan	-	-	Sudah dilaksanakan
2.	Pengukuran Kinerja - Agar terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja - Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP) - Agar seluruh pengumpulan data kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) - Agar seluruh pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor kesbangpol 2024	-	-	Sudah dilaksanakan

3.	Pelaporan Kinerja Agar laporan kinerja dipublikasi Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan Agar laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional (Banchmark kinerja)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor kesbangpol 2024	-	-	Sudah dilaksanakan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal di tindaklanjuti	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor kesbangpol 2024	-	-	Sudah dilaksanakan

D. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

Capaian Indikator hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga pada Tahun 2021 memperoleh predikat “AA” (Sangat Memuaskan) dengan nilai 90.10 (>70 – 80), sedangkan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 17,27 % dengan memperoleh predikat “A” (Memuaskan) dengan nilai 82,91 (>80 – 90). Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP sepanjang periode Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14. Hasil Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Periode 2021 - 2023

No.	Tahun	Nilai	Predikat	Bertambah / Berkurang
1.	2021	90.10	AA (Sangat Memuaskan) (>90 – 100)	-
2.	2022			
3.	2023	82.91	A (Memuaskan) (>80 – 90)	

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

Untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja, adapun beberapa poin penting yang mempengaruhi penilaian antara lain :

s

1. Kurangnya pemahaman aparatur perencana dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
2. Kurangnya koordinasi internal;
3. Konsultasi dan koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, maka diperlukan :

1. Peningkatan SDM aparatur perencana;
2. Peningkatan koordinasi internal (antar bidang) melalui rapat evaluasi internal secara rutin dan berkala;
3. Meningkatkan kemampuan dengan cara konsultasi dan koordinasi dengan OPD lainnya terkait penyusunan LKjIP (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Kantor Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sibolga (BP3D) ; dan Inspektorat Daerah Kota Sibolga).

BAN IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena semua capaian dari realisasi target yang telah ditetapkan dicapai dengan predikat PKO “Baik” ($80 \% < X \leq 100 \%$). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran 1 : Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, tercapai 93 %;
2. Capaian Kinerja Sasaran 2 : Presentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi, tercapai 100 %;
3. Capaian Kinerja Sasaran 3 : Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik, tercapai 100 %;

Hasil perhitungan PKO dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (%) (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (%) (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100 % - (2))
1	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembaruan Kebangsaan serta Kehidupan Berpolitik demi Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76	93	100	100%	15%	85%
2		Persentase Jumlah Konflik yang telah Ditangani dan Keseluruhan Konflik Sosial yang Terjadi	78	100	100	100%	15%	85%
3		Persentase Pertumbuhan Pembinaan Politik	80	100	100	100%	15%	85%
Total Capaian PK								255%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata - rata Capaian PK								85%
Predikat PKO								Baik

Sumber : Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan, Tahun 2024

B. REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024, terdapat beberapa strategi yang diperlukan guna meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rencana penyerapan anggaran dengan perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat untuk revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Menghindari potensi revisi DPA akibat pergeseran dan pengurangan anggaran;
3. Berusaha mendapatkan sumber dana yang mencukupi;
4. Peningkatan komitmen pimpinan masing-masing unit eselon III dan IV dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melekat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan integritas pegawai sebagai bentuk pengawasan atasan langsung sampai individu pegawai dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan; dan
6. Melakukan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi dan penerapan sistem data dan informasi yang handal, termasuk pemantauan dan pelaporan yang baik, tepat waktu, akurat, mutakhir dan antisipatif.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LKj diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LKj Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan – perbaikan

perlu segera dilakukan, terutama menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator – indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Kiranya LKj Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga, serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja ditahun selanjutnya. LKj ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa – masa mendatang.

Sibolga Januari 2025

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SIBOLGA,**



Ahmad Yari Nasution
Ahmad Yari Nasution
Pembina/IVA

NIP. 19680426 198903 1 005